

PENGARUH PAJAK DAERAH, PAJAK RETRIBUSI, DAN PAJAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH MALANG RAYA

Fariz Wijayanto^{a*}, Setyo Wahyu Sulistyono^b

^{a,b}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

* Corresponding author: fariswijaya02@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of regional taxes, retributions, and regional autonomy taxes on the original local government revenue of Malang areas, such as Malang City, Malang Regency, and Batu City in the 2013-2022 periods. This research uses a quantitative approach. The research data was collected using documentation techniques from the Bappeda of Malang City, Malang Regency, and Batu City to explore more detailed data on various aspects, such as local taxes, retributions, regional autonomy taxes, and original local government revenue, in the Malang areas. Data analysis consisted of descriptive statistical analysis, classical assumption test, and multiple linear regression analysis. The results of this study show that local taxes, retributions, and regional autonomy taxes have a significant effect on original local government revenue of Malang City, Malang Regency, and Batu City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak otonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu pada periode 2013-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dari Bappeda Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu untuk menggali data yang lebih rinci mengenai berbagai aspek, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pajak otonomi daerah, dan pendapatan asli daerah, di daerah Malang. Analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Keywords: *Local taxes; retribution; regional autonomy taxes; original local government revenue*

JEL Classification:

G31, H20, R11

Artikel Info

Article history:

Received 23 Maret 2024

Revised 5 Oktober

Accepted 7 Oktober 2024

Available online 11 Oktober 2024

Copyright (c) 2024

Fariz, W. & Setyo, W.S.

This is an open access article and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

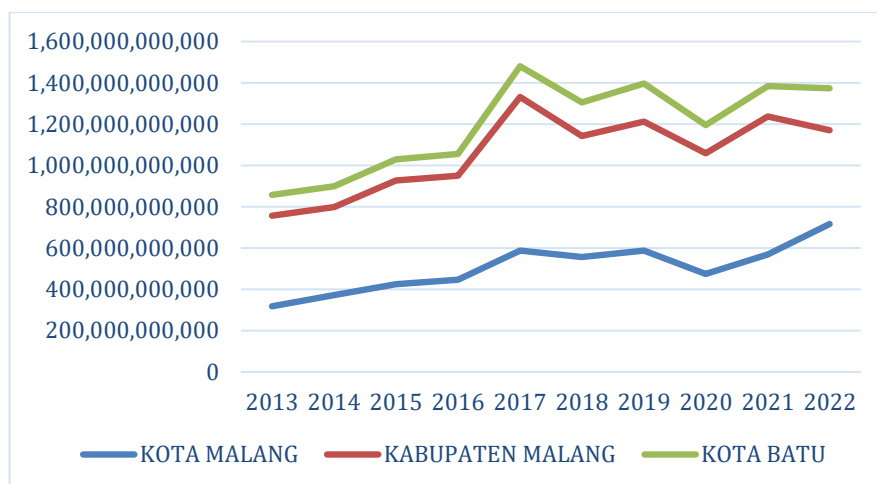


PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembangunan utama. Potensi PAD yang berbeda-beda di tiap daerah mendorong pengembangan sumber daya setempat untuk meningkatkan pendapatan. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, PAD dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah karena kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD (Syahadat & Ramadhan, 2022).

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan PAD tinggi, mencapai Rp21,25 triliun di tahun 2021. Prestasi ini menempatkan Jawa Timur di posisi kedua setelah DKI Jakarta dengan PAD Rp35,11 triliun (Badan Pusat Statistik, 2022). Beberapa faktor pendorong tingginya PAD Jawa Timur adalah jumlah penduduk yang besar, yaitu 39,74 juta jiwa di tahun 2020, sehingga membuka potensi pasar bagi industri dan bisnis. Selain itu, Jawa Timur kaya akan sumber daya alam seperti perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, yang menjadi sumber pendapatan melalui pajak dan retribusi (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2022).

Salah satu wilayah yang terkenal dengan sektor pariwisata dan memiliki hasil sumber daya alam seperti hasil pertanian dan perkebunan adalah Malang Raya. Malang Raya merupakan wilayah metropolitan dan daerah karesidenan yang terdiri dari tiga wilayah, yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Pertumbuhan sektor usaha di wilayah Malang Raya, seperti pariwisata, properti, dan sektor perdagangan, turut mempengaruhi penerimaan PAD. Peningkatan pesat pada sektor-sektor tersebut dapat mendorong penerimaan pajak dari pajak usaha dan retribusi jasa.



Gambar 1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Malang Raya

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa ketiga daerah tersebut memiliki tren PAD yang meningkat dari tahun 2013 hingga 2022. Kota Batu memiliki nilai PAD yang paling tinggi di wilayah Malang Raya karena ditopang oleh sektor pariwisata dan perdagangan. Sedangkan Kota Malang menjadi daerah penghasil PAD terendah jika dibandingkan dengan kedua daerah lainnya karena di Kota Malang hanya didukung dengan ikon kuliner saja yang mendominasi. Kondisi tersebut membuat para pemangku kebijakan pada area Malang Raya optimis menargetkan PAD lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli lain-lain yang sah (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kumala, 2019), (Ramadhan, 2019). Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Dewantoro, 2022).

Peningkatan atau tren positif pada PAD, menandakan bahwa terjadi peningkatan pada sumber-sumber PAD. Beberapa studi sebelumnya juga menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap PAD (Kencana, Aladin, & Armaini, 2022), (Yusmalina et al., 2020). Sedangkan Jebarut (2022) menyatakan bahwa hanya retribusi daerah saja yang berpengaruh terhadap PAD dan pajak daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD. Penelitian lain ada juga yang menyatakan bahwa retribusi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD (Farianti, 2020), (Kencana et al., 2022).

Adanya ketidak konsistenan tentang pengaruh sumber pendapatan daerah terhadap PAD pada penelitian sebelumnya, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ini. Tujuannya penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana sebenarnya dampak dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak otonomi daerah terhadap PAD di wilayah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Ketiga daerah dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD melalui sumber-sumber pendapatan tersebut. Selain itu, alasan lain dari pemilihan objek diantaranya: (1) ketiga daerah termasuk dalam Status Wilayah Perkotaan (SWP) yang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur No. 2 Tahun 2006. Pasal 10 ayat 4 huruf (b) yang menjelaskan bahwa Malang Raya berfungsi sebagai pusat pengembangan berbagai sektor, dengan pusat SWP berperan sebagai pusat pelayanan wilayah, pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, (2) karakteristik daerah yang relatif serupa, yakni sebagai

daerah perkotaan dengan tingkat perekonomian yang tinggi, dimana dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan tingkat migrasi yang tinggi, sehingga kesamaan ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dampak pajak, retribusi, dan pajak otonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) Malang Raya memiliki potensi pajak daerah, retribusi, dan pajak otonomi daerah yang besar, ditunjukkan oleh jumlah penduduk yang besar, tingkat perekonomian yang tinggi, dan sumber daya alam yang melimpah. Sehingga potensi ini dapat mendorong pertumbuhan PAD, (4) ketiga daerah tersebut telah mengalami pertumbuhan PAD yang cepat dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan peran penting pajak daerah, retribusi, dan pajak otonomi daerah dalam meningkatkan PAD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan panel data. Objek penelitian yang digunakan adalah wilayah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya variabel independennya adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak otonomi daerah (X_3). Sumber data penelitian adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bappeda Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Periode waktu penelitian adalah data tahunan 2013 – 2022.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Ketetrangan:

Y	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X1	: Pajak daerah
X2	: Retribusi daerah
X3	: Pajak otonomi daerah
β_0	:Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
ε	: Variabel pengganggu
i	: <i>cross section</i> 3 daerah di Malang Raya
t	: <i>time series</i> 2013-2022

Terdapat tiga model pada regresi data panel yaitu, *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Pada penelitian data panel, pengujian estimasi model merupakan tahap awal dengan menyeleksi beberapa model estimasi untuk memperoleh model yang paling sesuai dengan data penelitian. Uji yang digunakan yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Uji chow merupakan uji untuk menentukan model yang paling tepat antaran *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Ketentuannya jika nilai probablity > 0,05 maka menggunakan CEM dan jika nilai probablity < 0,05 maka menggunakan FEM. Selanjutnya, uji Hausman merupakan uji untuk menentukan model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Jika hasil uji menunjukkan nilai probablity > 0,05 maka menggunakan model REM dan apabila nilai probablity < 0,05 maka menggunakan FEM. Uji yang terakhir dilakukan adalah Lagrange Multiplier (LM), dimana merupakan uji untuk menentukan model yang paling tepat anatara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Ketika hasil nilai probablity > 0,05 maka menggunakan model CEM dan saat nilai probablity < 0,05 maka menggunakan REM .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada analisis regresi data panel untuk menganalisis bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak otonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Malang Raya, maka diperoleh tiga model, yaitu CEM, FEM, dan REM. Hasil dari ketiga model diuji untuk menentukan model yang paling sesuai dala penelitian. Pemilihan model yang paling sesuai melalui beberapa uji disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji Pemilihan Model	Hasil Uji	Prob.	Keterangan
Chow Test	Cross-section Chi-square	0,0657	CEM
Hausman Test	Cross-section Random	0,0000	FEM
Lagrange Multiplier	Breusch-Pagan	0,5421	CEM

Dapat dilihat dari hasil uji pada tabel 1, menunjukkan bahwa hasil Uji Chow memiliki nilai prob sebesar 0,0657 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model*. Selanjutnya, hasil uji Hausman memperoleh nilai prob sebesar 0,0000 yang artinya kurang dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Hasil kedua uji tidak konsisten, maka dilanjutkan dengan uji LM yang menghasilkan nilai prob sebesar 0,5421 yang lebih besar dari 0,05, maka model yang paling sesuai adalah *Common Effect Model*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model *Common Effect Model* lebih sesuai untuk penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Regresi Common Effect Model

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-3.77E+11	-12.28232	0.0000
X1	1.008785	119.0839	0.0000
X2	1.70E+10	12.19652	0.0000
X3	0.989348	153.3353	0.0000
R-squared	0,999794		
Adjusted R-squared	0,999769		
Prob (F Statistic)	0,000000		

Hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak otonomi daerah berpengaruh secara bersama-sama, dilihat dari hasil nilai prob F = 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,0,. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.999769 yang berarti bahwa 99,97% variabel dalam model mampu menjelaskan pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya yaitu 0,3% variabel yang tidak masuk dalam model.

Hasil dari analisis regresi CEM menunjukkan bahwa variabel X1 yang merupakan pajak daerah memiliki nilai prob 0,0000 < 0,05, sehingga berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Malang Raya. Ini artinya, saat penerimaan pajak daerah meningkat, maka besaran pendapatan asli daerah juga meningkat. Pajak daerah merupakan sumber utama PAD yang secara konsisten menunjukkan kontribusi terbesar dibandingkan dengan retribusi dan pajak otonomi daerah. Di Kota Malang, pajak daerah terus meningkat dari Rp 272,69 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp 547,45 miliar pada tahun 2022, berkontribusi signifikan terhadap kenaikan PAD dari Rp 317,77 miliar menjadi Rp 715,62 miliar. Peningkatan pajak daerah ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Kenaikan ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi lokal, urbanisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak.

Hasil studi ini didukung dengan beberapa studi yang menyebutkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD (Kencana et al., 2022) (Yusmalina et al., 2020), (Rizki, et al., 2021). Peningkatan perolehan pajak adalah indikasi positif dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Pendapatan pajak yang naik juga dapat dipengaruhi oleh faktor urbanisasi karena konsentrasi populasi dalam area perkotaan cenderung menciptakan lebih banyak peluang bisnis dan transaksi yang berpotensi untuk dikenai pajak. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak juga dapat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan pajak, karena masyarakat yang lebih sadar akan

kewajiban mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, mengurangi potensi kehilangan pendapatan karena penghindaran pajak (Akib et al., 2023).

Variabel X2 yang merupakan retribusi daerah juga berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Malang Raya, dimana ditunjukkan oleh nilai prob sebesar $0,0000 < 0,05$. Retribusi daerah meliputi berbagai jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penggunaan layanan publik, seperti pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir, pasar, dan lain-lain. Penerimaan dari retribusi ini memberikan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah, sehingga akan terjadi peningkatan pada PAD yang memungkinkan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mulyani & Ramdini (2021) yang menyatakan bahwa retribusi yang stabil dan konsisten merupakan komponen vital dalam menjaga keberlanjutan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Pajak otonomi daerah atau variabel X3 juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Malang Raya, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai prob. Sebesar $0,0000 < 0,05$. Pajak otonomi daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang diandalkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Semakin tinggi pajak yang dipungut oleh daerah, maka semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat dihasilkan, sehingga memberikan kemampuan finansial yang lebih kuat bagi daerah untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya. Hasil ini selaras dengan penelitian (Mulyani & Ramdini, 2021) bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penting dalam tingkat pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pajak otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu pada periode 2013-2022. Jika pemerintah masing-masing daerah di wilayah Malang Raya ingin meningkatkan PAD, maka harus berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber PAD yang terdiri dari pajak daerah, pajak retribusi, dan pajak otonomi daerah. Pemerintah harus mengelola sumber daya keuangan secara efektif serta melakukan penyesuaian atas tarif pajak maupun retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, M., Umar, W., & Marjani, M. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 126–138.

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47.
- Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2022). *Laporan Realisasi PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021*. Surabaya: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Farianti, N. A. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 5(2), 105–114.
- Jebarut, M. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i8.565>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(8), 1144–1149.
- Kumala, R. (2019). Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 38–41.
- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81.
- Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 68–82.
- Syahadat, Y. A., & Ramadhan, D. (2022). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 341–350. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.997>
- Yusmalina, Lasita, & Fauzan Haqiqi. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1(1), 13–21.